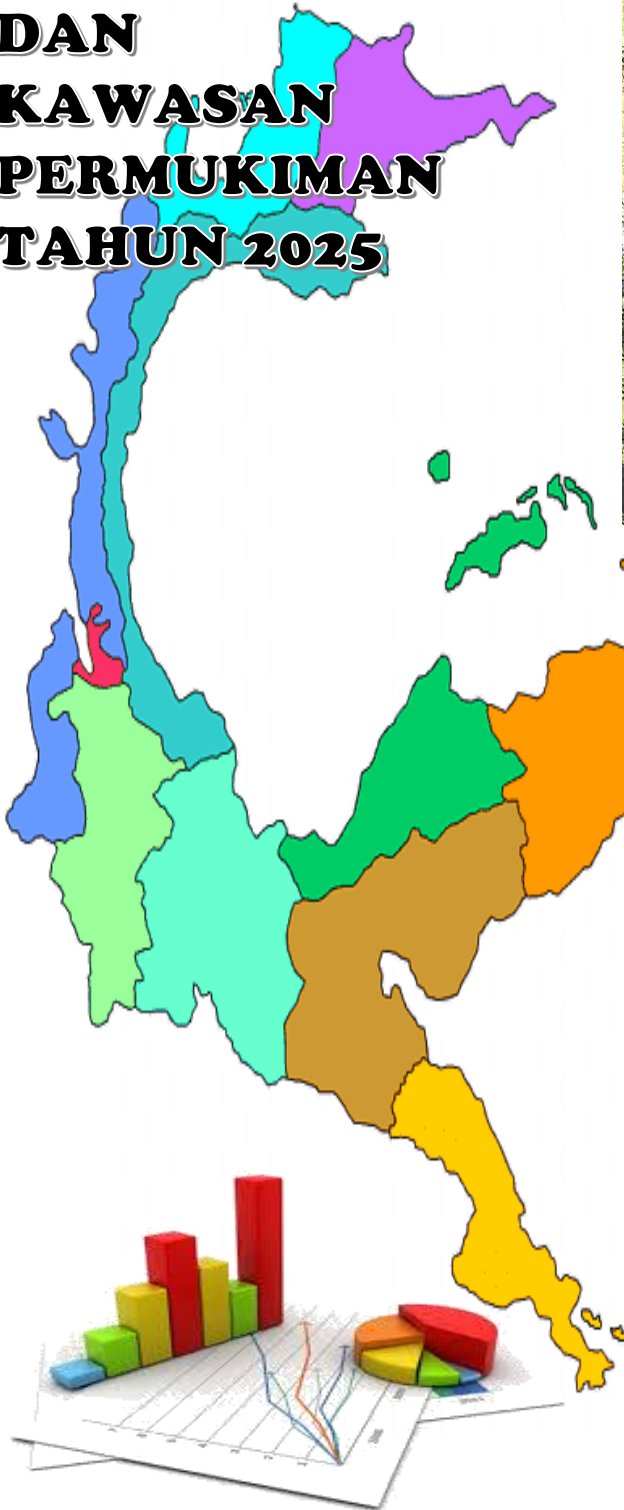


**DATA STATISTIK
SEKTORAL
PERUMAHAN
DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
TAHUN 2025**



**DINAS
PERUMAHAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
DAN
PERTANAHAN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat dan rahmatnya sehingga Buku Data Statistik Sektoral Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan:

Buku Statistik Perumahan dan Kawasan Permukiman mencakup data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan. Data tersebut yaitu:

1. Indeks Infrastruktur Daerah (Indeks Perumahan dan Kawasan Permukiman).
2. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PKP).
3. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan Tahun 2025.
4. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Tahun 2025.
5. Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang di tangani Tahun 2025
6. Permukiman yang terfasilitasi PSU tahun 2025.
7. Kasus Sengketa Tanah yang terfasilitasi tahun 2025.
8. Persentase Areal Kawasan Kumuh tahun 2024;
9. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni tahun 2024;
10. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemda Provinsi yang memperoleh Fasilitas rumah layak huni;
11. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan tahun 2024;
12. Persentasi Rumah Tangga Hunian Layak tahun 2024;
13. Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang di tangani tahun 2024;
14. Satuan perumahan yang sudah dilengkapi prasana sarana dan utilitas umum tahun 2024;
15. Presentasi Luas Lahan Bersertifikat tahun 2024;
16. Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria Tahun 2024;
17. Jumlah Bidang Tanah yang didistribusi (Bidang Tanah) Tahun 2024

Buku Statistik Perumahan dan Kawasan Permukiman memuat 17 (Tujuh Belas) Data Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dipublikasikan kedalam Aplikasi Satu Data Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah:

1. Nomor 000.7/341/Bappeda-G.ST/2025 tanggal 15 Oktober 2025 tentang Daftar Data Daerah dan Data Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026
2. Nomor.500.14.3.4/533/BAPPEDA-G.ST/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Daftar Data Daerah dan Data Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberi kontribusi dalam penyelesaian Buku Statistik Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 ini, semoga dapat memberi manfaat.

Palu, 31 Desember 2025
Kepala Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



ABDUL HARIS KARIM, ST.,MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19700422 199303 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Data Daerah dan Data Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025:	
Indeks Infrastruktur Daerah (Indeks Perumahan dan Kawasan Permukiman) Tahun 2025	1
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PKP)	3
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan Tahun 2025	5
Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Tahun 2025	7
Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang di tangani Tahun 2025 ...	9
Permukiman yang terfasilitasi PSU tahun 2025	11
Kasus Sengketa Tanah yang terfasilitasi tahun 2025	13
Daftar Data Daerah dan Data Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024:	
Persentase Areal Kawasan Kumuh Tahun 2024	15
Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Tahun 2024	16
Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemda Provinsi Yang Memperoleh Fasilitas Rumah Layak Huni Tahun 2024.....	18
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Tahun 2024	20
Persentasi Rumah Tangga Hunian Layak Tahun 2024	21
Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani Tahun 2024	22
Satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU Tahun 2024	23
Presentasi Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2024	25

Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria	27
Jumlah Bidang Tanah yang didistribusi (Bidang Tanah)	30
DAFTAR PUSTAKA	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indeks Infrastruktur Daerah (Indeks Perumahan dan Kawasan Permukiman) Tahun 2025	1
Tabel 2 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun 2025.....	3
Tabel 3 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan Tahun 2025	5
Tabel 4 Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Tahun 2025	7
Tabel 5 Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang di tangani Tahun 2025	9
Tabel 6 Permukiman yang terfasilitasi PSU tahun 2025	11
Tabel 7 Kasus Sengketa Tanah yang terfasilitasi tahun 2025	13
Tabel 8 Persentase Areal Kawasan Kumuh Tahun 2024	15
Tabel 9 Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Tahun 2024	16
Tabel 10 Pendataan & Pemetaan Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Wilayah I Hasil Identifikasi Jumlah Rumah Di Lokasi Rawan Bencana, RLH dan RTLH di Lokasi Rawan Bencana	18
Tabel 11 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Tahun 2024.....	20
Tabel 12 Persentasi Rumah Tangga Hunian Layak Tahun 2024	21
Tabel 13 Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani Tahun 2024	22
Tabel 14 Satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU Tahun 2024	23
Tabel 15 Presentasi Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2024	25
Tabel 16 Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria Tahun 2024	27
Tabel 17 Jumlah Bidang Tanah yang didistribusi (Bidang Tanah) Tahun 2024	30

INDEKS INFRASTRUKTUR DAERAH (PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN) PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

Tabel 1. Indeks Infrastruktur Daerah (Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanian) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

INDIKATOR	SKOR
Infrastruktur Perumahan	79,72
Infrastruktur Kawasan Permukiman	79,69
Indeks Infrastruktur Daerah (Perkimtan)	79,71

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanian Prov.Sulteng

Satuan : Indeks (0-100)

Indeks Infrastruktur Daerah (IID) sektor Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian (PERKIMTAN) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja pembangunan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kualitas hunian, lingkungan permukiman, serta tata kelola pertanian. Penilaian indeks ini menggunakan skala 0 sampai dengan 100, di mana nilai yang semakin tinggi menunjukkan kondisi infrastruktur yang semakin baik.

Pada tahun 2025, capaian IID PERKIMTAN Provinsi Sulawesi Tengah tercatat sebesar 79,71 yang termasuk dalam kategori sangat baik. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dasar secara berkelanjutan.

Secara rinci, capaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Infrastruktur Perumahan memperoleh nilai 79,72 yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah menempati rumah layak huni dengan dukungan prasarana dasar yang memadai, seperti akses air minum, sanitasi, serta kondisi bangunan yang memenuhi standar kelayakan.
2. Infrastruktur Kawasan Permukiman mencapai nilai 79,69 yang mengindikasikan bahwa kualitas lingkungan permukiman telah tertata dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh ketersediaan infrastruktur lingkungan seperti jalan permukiman, drainase, pengelolaan persampahan, serta berkurangnya kawasan kumuh.

Secara keseluruhan, capaian IID PERKIMTAN sebesar 79,71 menunjukkan bahwa pembangunan sektor perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan di Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PKP) PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

Tabel 1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

ASPEK PELAYANAN	SKOR
Kualitas Infrastruktur	85,06
Aksesibilitas Layanan	78,83
Ketepatan Waktu Layanan	82,92
Responsivitas Petugas	67,81
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur PKP	78,66

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulteng

Satuan : Indeks (0-100)

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan infrastruktur di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Penilaian indeks ini mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan layanan yang berkualitas, mudah diakses, tepat waktu, dan responsif.

Pada tahun 2025, capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur PKP Provinsi Sulawesi Tengah tercatat sebesar 78,66 yang berada pada kategori sangat baik. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat merasa puas terhadap layanan infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Adapun capaian pada masing-masing aspek pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Infrastruktur memperoleh nilai 85,06 yang menunjukkan bahwa kondisi fisik infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman dinilai sangat baik oleh masyarakat. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kualitas, seperti jalan lingkungan, drainase, air minum, dan sanitasi.
2. Aksesibilitas Layanan mencapai nilai 78,83 yang mengindikasikan bahwa masyarakat relatif mudah dalam memperoleh layanan infrastruktur, baik dari sisi jangkauan wilayah maupun kemudahan prosedur pelayanan.

3. Ketepatan Waktu Layanan mencatat nilai 82,92 yang menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan sudah cukup tepat waktu, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam hal percepatan proses pelayanan dan penyelesaian pekerjaan.
4. Responsivitas Petugas memperoleh nilai 67,81 yang mencerminkan bahwa petugas pelayanan cukup tanggap dalam merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat, namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai tingkat pelayanan yang lebih optimal.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur PKP sebesar 78,66 menunjukkan bahwa kinerja pelayanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan dengan sangat baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

**PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN AKSES HUNIAN LAYAK
TERJANGKAU DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2025**

Tabel 3. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan Tahun 2025

No.	Kota / Kabupaten	Jumlah Rumah (Unit)	Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan (Unit)	Persentasi Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)
1	Kabupaten Banggai Kepulauan	32	19	59,79
2	Kabupaten Banggai	98	86	87,85
3	Kabupaten Morowali	37	31	84,75
4	Kabupaten Poso	58	54	92,58
5	Kabupaten Donggala	76	57	74,07
6	Kabupaten Toli -Toli	53	35	66,84
7	Kabupaten Buol	34	26	75,61
8	Kabupaten Parigi Moutong	112	91	80,88
9	Kabupaten Tojo Una - Una	35	26	73,37
10	Kabupaten Sigi	70	60	85,12
11	Kabupaten Banggai Laut	18	13	71,77
12	Kabupaten Morowali Utara	29	24	81,17
13	Kota Palu	79	78	98,37
Total Keseluruhan		731	598	81,79

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulteng

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan Tahun 2025, total rumah yang tercatat mencapai 731 unit, dengan 598 rumah tangga telah memiliki akses terhadap hunian layak, sehingga menghasilkan capaian agregat sebesar 81,79 persen. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum

kinerja penyediaan hunian layak sudah berada pada kategori cukup baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai pemerataan penuh.

Jika ditinjau per wilayah, terdapat variasi capaian yang cukup signifikan. Kota Palu mencatat persentase tertinggi sebesar 98,37 persen, diikuti oleh Kabupaten Poso (92,58 persen) dan Kabupaten Banggai (87,85 persen). Capaian ini mengindikasikan bahwa sebagian besar rumah tangga di wilayah tersebut telah menikmati akses hunian yang memenuhi standar.

Di sisi lain, beberapa daerah masih menunjukkan capaian relatif lebih rendah, seperti Kabupaten Banggai Kepulauan (59,79 persen) dan Kabupaten Toli-Toli (66,84 persen). Kondisi ini mengindikasikan masih adanya keterbatasan akses hunian layak yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor geografis, keterjangkauan ekonomi, maupun ketersediaan infrastruktur pendukung.

Secara keseluruhan, distribusi capaian ini menegaskan perlunya intervensi kebijakan yang lebih terarah, khususnya pada daerah dengan persentase rendah, melalui penguatan program perumahan, peningkatan kualitas infrastruktur dasar, serta dukungan pembiayaan yang inklusif. Dengan demikian, target pemerataan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dapat tercapai secara lebih optimal di seluruh wilayah.

PERSENTASE WARGA NEGARA KORBAN BENCANA YANG MEMPEROLEH RUMAH LAYAK HUNI TAHUN 2025

Tabel 4. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Tahun 2025

No.	Kota / Kabupaten	Jumlah Korban Bencana (KK)	Jumlah yang Menerima Rumah Layak Huni (KK)	Presentase yang Menerima Rumah Layak Huni (%)
1	Kabupaten Banggai Kepulauan	-	-	-
2	Kabupaten Banggai	-	-	-
3	Kabupaten Morowali	-	-	-
4	Kabupaten Poso	-	-	-
5	Kabupaten Donggala	-	-	-
6	KabupatenToli -Toli	-	-	-
7	Kabupaten Buol	-	-	-
8	Kabupaten Parigi Moutong	-	-	-
9	Kabupaten Tojo Una - Una	-	-	-
10	Kabupaten Sigi	48	48	100
11	Kabupaten Banggai Laut	-	-	-
12	Kabupaten Morowali Utara	-	-	-
13	Kota Palu	-	-	-
Total Keseluruhan		48	48	100

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulteng

Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni tahun 2025 pada tingkat kabupaten/kota. Indikator ini menggambarkan tingkat respons dan efektivitas pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat terdampak bencana.

Berdasarkan data yang tersedia, tercatat 48 kepala keluarga (KK) sebagai korban bencana, dan seluruhnya telah menerima bantuan rumah layak huni, sehingga capaian indikator mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara agregat, penanganan pascabencana pada aspek penyediaan hunian telah terlaksana secara optimal dan tepat sasaran.

Secara spasial, capaian tersebut terkonsentrasi di Kabupaten Sigi, yang mencatat sebanyak 48 KK korban bencana dan seluruhnya telah memperoleh rumah layak huni dengan capaian 100 persen. Sementara itu, pada kabupaten/kota lainnya tidak terdapat data korban bencana atau tidak dilaporkan adanya kebutuhan penyediaan hunian pada periode tersebut, yang ditunjukkan dengan tanda strip (-) pada tabel.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa intervensi pembangunan perumahan bagi korban bencana pada tahun 2025 bersifat spesifik lokasi (localized), dengan fokus penanganan pada wilayah terdampak. Keberhasilan pencapaian 100 persen ini mencerminkan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta pemangku kepentingan terkait dalam memastikan pemulihan pascabencana berjalan efektif.

PERSENTASE LUAS KAWASAN KUMUH 10-15 HA YANG DI TANGANI 2025

Tabel 5. Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang di tangani 2025

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Luasan Kawasan Kumuh (Ha)	Jumlah Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi 10 - 15 (Ha)	Luas Kawasan Kumuh 10-15 (Ha) yang Ditangani	Persentase Luasan kawasan Kumuh 10-15 Ha yang tertangani (%)	Keterangan
1	Kab. Banggai Kepulauan	93,00	14,00	0,10	0,71	
2	Kab. Banggai	78,81	20,37	0,60	2,95	
3	Kab. Morowali	301,43	11,08	0,25	2,26	
4	Kab. Poso	112,79	10,10	2,82	27,92	
5	Kab. Donggala	95,39	35,16	1,25	3,56	
6	Kab. Toli-toli	189,46	0,00	0,34	0,18	Tidak ada kewenangan Provinsi
7	Kab. Buol	81,43	10,45	0,00	0,00	
8	Kab. Parigi Moutong	72,11	12,00	0,61	5,08	
9	Kab. Tojo Una-una	190,30	92,50	1,28	1,38	
10	Kab. Sigi	46,17	0,00	1,26	2,73	Tidak ada kewenangan Provinsi
11	Kab. Banggai Laut	177,00	49,80	0,50	1,00	
12	Kab. Morowali Utara	77,20	23,00	0,08	0,35	
13	Kota Palu	132,35	23,50	4,98	21,19	
Jumlah		1647,44	301,96	14,07	69,31	

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulteng

Persentase luas kawasan kumuh 10–15 hektare yang ditangani tahun 2025 pada tingkat kabupaten/kota. Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja penanganan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi, khususnya pada kategori luasan menengah (10–15 Ha).

Secara agregat, total luas kawasan kumuh yang teridentifikasi mencapai 1.647,44 Ha, dengan porsi kewenangan provinsi sebesar 301,96 Ha. Dari luasan tersebut, realisasi penanganan tercatat sebesar 14,07 Ha, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 69,31 persen. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar target penanganan pada kategori ini telah terealisasi, meskipun masih terdapat ruang untuk optimalisasi pada beberapa wilayah.

Jika ditinjau secara spasial, capaian penanganan menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar daerah. Kabupaten Poso mencatat kinerja tertinggi dengan capaian 27,92 persen, diikuti oleh Kota Palu (21,19 persen) dan Kabupaten Parigi Moutong (5,08 persen). Capaian ini mencerminkan adanya prioritas dan intensitas intervensi yang relatif lebih tinggi pada wilayah-wilayah tersebut.

Di sisi lain, terdapat beberapa daerah dengan capaian rendah, seperti Kabupaten Toli-Toli (0,18 persen), Kabupaten Morowali Utara (0,35 persen), dan Kabupaten Banggai Kepulauan (0,71 persen). Bahkan, Kabupaten Buol belum menunjukkan realisasi penanganan (0 persen). Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan kewenangan, kesiapan perencanaan, maupun dukungan pendanaan.

Selain itu, terdapat daerah yang tidak menjadi kewenangan provinsi dalam penanganan kawasan kumuh pada kategori ini, seperti Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Sigi, sebagaimana tercantum dalam kolom keterangan. Hal ini menunjukkan perlunya koordinasi lintas level pemerintahan untuk memastikan penanganan kawasan kumuh tetap berjalan secara komprehensif.

Secara keseluruhan, capaian tahun 2025 mengindikasikan bahwa upaya penanganan kawasan kumuh 10–15 Ha telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan intervensi yang lebih merata, terutama pada daerah dengan capaian rendah. Ke depan, diperlukan peningkatan sinergi program, percepatan implementasi kegiatan fisik, serta penguatan aspek perencanaan dan penganggaran agar target pengurangan kawasan kumuh dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

**PERMUKIMAN YANG TERFASILITASI PRASARANA SARANA DAN
UTILITAS UMUM (PSU) TAHUN 2025**

Tabel 6. Permukiman yang Terfasilitasi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tahun 2025

No.	Kabupaten / Kota	Tahun 2025 (Unit)
1	Kabupaten Banggai Kepulauan	-
2	Kabupaten Banggai	16
3	Kabupaten Morowali	4
4	Kabupaten Poso	49
5	Kabupaten Donggala	29
6	Kabupaten Toli -Toli	23
7	Kabupaten Buol	4
8	Kabupaten Parigi Moutong	53
9	Kabupaten Tojo Una - Una	42
10	Kabupaten Sigi	53
11	Kabupaten Banggai Laut	-
12	Kabupaten Morowali Utara	4
13	Kota Palu	42
Total Keseluruhan		319

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulteng

Jumlah permukiman yang terfasilitasi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) tahun 2025 pada tingkat kabupaten/kota. Indikator ini mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung kelayakan huni dan keberlanjutan kawasan.

Secara keseluruhan, jumlah permukiman yang telah difasilitasi PSU pada tahun 2025 mencapai 319 unit. Capaian ini menunjukkan adanya komitmen yang cukup kuat dalam mendukung peningkatan kualitas permukiman, meskipun distribusinya antar wilayah masih bervariasi.

Berdasarkan sebaran wilayah, capaian tertinggi tercatat di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi, masing-masing sebesar 53 unit, diikuti oleh Kabupaten Poso (49 unit) serta Kota Palu dan Kabupaten Tojo Una-Una yang masing-masing mencapai 42 unit. Tingginya capaian di wilayah-wilayah tersebut mengindikasikan adanya prioritas penanganan atau kebutuhan infrastruktur yang relatif lebih besar.

Sementara itu, beberapa daerah menunjukkan capaian yang relatif lebih rendah, seperti Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Morowali Utara yang masing-masing hanya mencapai 4 unit. Di sisi lain, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut tidak mencatat realisasi pada tahun 2025, yang ditunjukkan dengan tanda strip (-). Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan program, perbedaan prioritas pembangunan, atau faktor kesiapan teknis dan administratif.

Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa fasilitasi PSU telah berjalan cukup baik dalam mendukung peningkatan kualitas permukiman. Namun demikian, diperlukan upaya pemerataan intervensi, khususnya pada wilayah dengan capaian rendah atau belum terealisasi, melalui penguatan perencanaan, peningkatan alokasi anggaran, serta sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, target pembangunan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan dapat tercapai secara lebih merata di seluruh wilayah.

KASUS SENGKETA TANAH YANG TERFASILITASI TAHUN 2025

Tabel 7. Kasus Sengketa Tanah yang terfasilitasi tahun 2025

No.	Kota / Kabupaten	Jumlah Kasus
1	Kabupaten Banggai Kepulauan	-
2	Kabupaten Banggai	9
3	Kabupaten Morowali	7
4	Kabupaten Poso	4
5	Kabupaten Donggala	5
6	KabupatenToli -Toli	2
7	Kabupaten Buol	1
8	Kabupaten Parigi Moutong	1
9	Kabupaten Tojo Una - Una	1
10	Kabupaten Sigi	-
11	Kabupaten Banggai Laut	-
12	Kabupaten Morowali Utara	12
13	Kota Palu	6
Total Keseluruhan		48

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulteng

Jumlah kasus sengketa tanah yang terfasilitasi tahun 2025 pada tingkat kabupaten/kota. Indikator ini mencerminkan peran pemerintah dalam memediasi dan memfasilitasi penyelesaian konflik pertanahan guna menciptakan kepastian hukum serta mendukung stabilitas sosial dan investasi daerah.

Secara agregat, jumlah kasus sengketa tanah yang berhasil difasilitasi pada tahun 2025 tercatat sebanyak 48 kasus. Capaian ini menunjukkan adanya upaya aktif pemerintah daerah dalam menangani berbagai permasalahan pertanahan yang terjadi di masyarakat.

Jika dilihat dari distribusi wilayah, Kabupaten Morowali Utara mencatat jumlah kasus tertinggi yang difasilitasi, yaitu 12 kasus, diikuti oleh Kabupaten Banggai (9

kasus) dan Kabupaten Morowali (7 kasus). Selanjutnya, Kota Palu mencatat 6 kasus, serta Kabupaten Donggala (5 kasus) dan Kabupaten Poso (4 kasus). Tingginya jumlah kasus yang difasilitasi pada wilayah-wilayah tersebut dapat mengindikasikan intensitas konflik pertanahan yang relatif lebih tinggi, sekaligus menunjukkan respons penanganan yang cukup aktif.

Sementara itu, beberapa daerah menunjukkan jumlah kasus yang relatif rendah, seperti Kabupaten Toli-Toli (2 kasus), serta Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Tojo Una-Una yang masing-masing mencatat 1 kasus. Di sisi lain, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Banggai Laut tidak mencatat kasus yang difasilitasi pada tahun 2025, yang dapat diartikan tidak adanya kasus yang muncul atau belum adanya pelaporan/penanganan pada periode tersebut.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa fasilitasi penyelesaian sengketa tanah telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan penguatan dalam hal pencegahan konflik, peningkatan kapasitas mediasi, serta integrasi data pertanahan. Ke depan, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan secara cepat, adil, dan berkelanjutan.

PERSENTASE AREAL KAWASAN KUMUH TAHUN 2024

Tabel 8. Persentase Areal Kawasan Kumuh Tahun 2024

No.	Kota / Kabupaten	Luas (ha)	Luas Kawasan Kumuh (ha)	Persentase Areal Kawasan Kumuh (%)
1	Kabupaten Banggai Kepulauan	238.507	93,00	0,0390
2	Kabupaten Banggai	825.288	78,81	0,0095
3	Kabupaten Morowali	448.689	301,43	0,0672
4	Kabupaten Poso	754.593	112,79	0,0149
5	Kabupaten Donggala	512.659	95,39	0,0186
6	KabupatenToli -Toli	370.037	189,46	0,0512
7	Kabupaten Buol	372.358	81,43	0,0219
8	Kabupaten Parigi Moutong	580.561	72,11	0,0124
9	Kabupaten Tojo Una - Una	557.286	190,30	0,0341
10	Kabupaten Sigi	522.544	46,17	0,0088
11	Kabupaten Banggai Laut	68.815	177,00	0,2572
12	KabupatenMorowali Utara	873.601	77,20	0,0088
13	Kota Palu	35.635	108,93	0,3057
Total Keseluruhan		6.160.573	1.624,02	0,0264

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulteng

Pada tahun 2024 untuk Areal Kawasan Kumuh provinsi Sulawesi Tengah seluas 1.624,02 Ha dengan persentase areal kawasan kumuh 0,0264 % dari luas daerah. permukiman di Provinsi Sulawesi Tengah 6.160.573 Ha. Penanganan area kawasan kumuh pada provinsi Sulawesi Tengah bertujuan untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan.

PERSENTASE WARGA NEGARA KORBAN BENCANA YANG MEMPEROLEH RUMAH LAYAK HUNI TAHUN 2024

Tabel 9. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh
Rumah Layak Huni Tahun 2024

No.	Kota / Kabupaten	Jumlah Korban Bencana (KK)	Jumlah yang Menerima Rumah Layak Huni (KK)	Presentase yang Menerima Rumah Layak Huni (%)
1	Kabupaten Banggai Kepulauan	-	-	-
2	Kabupaten Banggai	-	-	-
3	Kabupaten Morowali	-	-	-
4	Kabupaten Poso	-	-	-
5	Kabupaten Donggala	1.854	1.833	99
6	Kabupaten Toli -Toli	-	-	-
7	Kabupaten Buol	-	-	-
8	Kabupaten Parigi Moutong	-	-	-
9	Kabupaten Tojo Una - Una	-	-	-
10	Kabupaten Sigi	2.646	2.589	98
11	Kabupaten Banggai Laut	-	-	-
12	Kabupaten Morowali Utara	-	-	-
13	Kota Palu	4.741	4.741	100
Total Keseluruhan		9.241	9.163	99

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulteng

Selanjutnya data warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni di tahun 2024 ada 2 kabupaten dan kota palu yang mendapatkan bantuan rumah layak huni yaitu Kabupaten Donggala dengan jumlah korban 1.854 KK dan jumlah yang menerima bantuan rumah layak huni sebanyak 1.833 KK atau sebanyak 99% dari jumlah kepala keluarga yang terdampak bencana. Pada Kabupaten Sigi jumlah korban bencana sebanyak 2.646 KK dan jumlah yang menerima bantuan rumah layak huni sebanyak 2.589 KK atau sebanyak 98% dari jumlah kepala keluarga yang terdampak bencana. Korban bencana di daerah Kota palu sebanyak pada tahun 2024 sebanyak 4.741 KK jumlah yang menerima bantuan rumah layak huni sebanyak

4.741 KK atau sebanyak 100% dari jumlah kepala keluarga yang terdampak bencana. Total keseluruhan jumlah korban bencana sebanyak 9.241 KK dan yang menerima bantuan rumah layak huni sebanyak 9.163 KK atau sebanyak 99% dari jumlah keluarga yang terdampak bencana di Provinsi Sulawesi Tengah.

**PERSENTASE WARGA NEGARA YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMDA
PROVINSI YANG MEMPEROLEH FASILITAS RUMAH LAYAK HUNI**

Tabel 10. Pendataan & Pemetaan Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Wilayah I
Hasil Identifikasi Jumlah Rumah Di Lokasi Rawan Bencana, RLH dan RTLH di Lokasi Rawan Bencana

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jenis Bencana	Jumlah Rumah di Lokasi Rawan Bencana (Unit)	Jumlah Rumah Layak Huni (RLH) di Lokasi Rawan Bencana (Unit)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Lokasi Rawan Bencana (Unit)
1	Parigi Moutong	Ampibabo	Tolole	Banjir	25	22	3
		Balinggi	Balinggi Jati	Banjir	9	8	1
			Lubagu	Banjir	9	9	0
		Toribulu	Sibalago	Banjir	38	25	13
		Torue	Torue	Banjir	36	32	4
2	Poso	Pamona Selatan	Mayoa	Banjir	6	6	0
		Pamona Barat	Meko	Banjir	15	13	2
		Pamona Pusalemba	Tonusu	Banjir	23	21	2
3	Morowali Utara	Bungku Utara	Kalombang	Banjir	8	8	0
			Uewaju	Banjir	21	9	12
		Petasia Timur	Mohoni	Banjir	22	18	4
			Togo Mulyo	Banjir	18	7	11
4	Morowali	Witaponda	Moahino	Abrasi	7	2	5

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulteng

Ditahun 2024 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah belum melakukan pendataan dan pemetaan perumahan di lokasi rawan bencana wilayah I tahun 2024. Sehingga untuk kebutuhan data “Warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemda Provinsi yang memperoleh Fasilitas rumah layak huni” belum dapat dipenuhi dengan data akurat sebagai data prioritas yang terdapat pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah .

Pendataan mulai ini dilakukan pada tahun 2025 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Pendataan dan pemetaan perumahan di lokasi rawan bencana wilayah I tahun 2025. Pendataan ini baru di 4 (empat) Kabupaten yaitu kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali Utara dan kabupaten Morowali. Pendataan ini untuk mendapatkan data warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemda Provinsi yang memperoleh Fasilitas rumah layak huni. Pendataan baru ini dilaksanakan pada tahun 2025.

Dari data sementara terdapat 4 (empat) kabupaten dengan beberapa desa yang terdampak bencana yang telah diidentifikasi oleh walidata yang telah ada di 13 (tiga belas) kabupaten dan 1 (satu) kota. 4 (empat) kabupaten tersebut yaitu : Kabupaten Parigi Moutong terdapat 5 (lima) desa dari 4 (empat) kecamatan yang telah diidentifikasi. Kabupaten Poso terdapat 3 (tiga) desa dari 3 (tiga) kecamatan yang telah diidentifikasi. Kabupaten Morowali Utara terdapat 4 (empat) desa dari 2 (dua) kecamatan yang telah teridentifikasi. Kabupaten Morowali terdapat 1 (satu) desa dari 1 kecamatan yang telah teridentifikasi.

RUMAH TANGGA DENGAN AKSES HUNIAN LAYAK, TERJANGKAU DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2024

Tabel 11. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Tahun 2024

No.	Kota / Kabupaten	Jumlah Rumah (Unit)	Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan (Unit)	Persentasi Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)
1	Kabupaten Banggai Kepulauan	32	19	60
2	Kabupaten Banggai	98	86	88
3	Kabupaten Morowali	37	31	85
4	Kabupaten Poso	58	54	93
5	Kabupaten Donggala	76	57	74
6	Kabupaten Toli -Toli	53	35	67
7	Kabupaten Buol	34	26	76
8	Kabupaten Parigi Moutong	112	91	81
9	Kabupaten Tojo Una - Una	35	26	73
10	Kabupaten Sigi	70	60	85
11	Kabupaten Banggai Laut	18	13	72
12	Kabupaten Morowali Utara	29	24	81
13	Kota Palu	79	78	98
Total Keseluruhan		731	598	82

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulteng

Data Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan yang terdapat pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 mencapai 82% atau sejumlah 598 unit dari jumlah rumah yang teridentifikasi sejumlah 731 unit.

PERSENTASI RUMAH TANGGA HUNIAN LAYAK TAHUN 2024

Tabel 12. Persentasi Rumah Tangga Hunian Layak Tahun 2024

No.	Kota / Kabupaten	Jumlah Rumah (Unit)	Rumah Layak Huni (Unit)	Persentasi Rumah Tangga Hunian Layak (%)
1	Kabupaten Banggai Kepulauan	32	19	60
2	Kabupaten Banggai	98	86	88
3	Kabupaten Morowali	37	31	85
4	Kabupaten Poso	58	54	93
5	Kabupaten Donggala	76	57	74
6	Kabupaten Toli -Toli	53	35	67
7	Kabupaten Buol	34	26	76
8	Kabupaten Parigi Moutong	112	91	81
9	Kabupaten Tojo Una - Una	35	26	73
10	Kabupaten Sigi	70	60	85
11	Kabupaten Banggai Laut	18	13	72
12	Kabupaten Morowali Utara	29	24	81
13	Kota Palu	79	78	98
Total Keseluruhan		731	598	82

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulteng

Persentasi rumah tangga hunian layak ditahun 2024 sebanyak 82% dengan jumlah keseluruhan 598 Unit dari jumlah rumah yang teridentifikasi sejumlah 731 unit. Data tersebut merupakan yang didapatkan dari identifikasi perumahan di 13 (tiga belas) kabupaten dan 1 Kota Palu.

PERSENTASE LUAS KAWASAN KUMUH 10-15 HA YANG DITANGANI TAHUN 2024

Tabel 13. Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani
Tahun 2024

No.	Kota / Kabupaten	Jumlah Luas Kawasan Kumuh (ha)	Jumlah Luas Kawasan Kumuh yang di tangani (ha)	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang di tangani (%)
1	Kabupaten Banggai Kepulauan	93,00	14,00	15,05
2	Kabupaten Banggai	78,81	20,37	25,85
3	Kabupaten Morowali	301,43	11,08	3,68
4	Kabupaten Poso	112,79	10,10	8,95
5	Kabupaten Donggala	95,39	35,16	36,86
6	KabupatenToli -Toli	189,46	0,00	0,00
7	Kabupaten Buol	81,43	10,45	12,83
8	Kabupaten Parigi Moutong	72,108	12,00	16,64
9	Kabupaten Tojo Una - Una	190,30	92,50	48,61
10	Kabupaten Sigi	46,17	0,00	0,00
11	Kabupaten Banggai Laut	177,00	49,80	28,14
12	Kabupaten Morowali Utara	77,20	23,00	29,79
13	Kota Palu	108,93	100,43	92,20
Total Keseluruhan		1.624,02	378,89	23,33

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulteng

Luas kawasan kumuh 10-15 Ha dari 13 (tiga belas) kabupaten dan 1 (satu) kota yang telah ditangani tahun 2024 yaitu seluas 378,89 Ha atau sekitar 23,33% dari jumlah kawasan kumuh yang teridentifikasi seluas 1.624,02 Ha. Penangan kawasan kumuh yang telah ditangani sesuai dengan SK Bupati dari 13 (Tiga Belas) kabupaten yang telah menetapkan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

**SATUAN PERUMAHAN YANG SUDAH DILENGKAPI PRASARANA SARANA
DAN UTILITAS UMUM (PSU) TAHUN 2024**

Tabel 14. Satuan perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Tahun 2024

No.	Kabupaten / Kota	Tahun 2024 (Unit)
1	Kabupaten Banggai Kepulauan	14
2	Kabupaten Banggai	72
3	Kabupaten Morowali	42
4	Kabupaten Poso	914
5	Kabupaten Donggala	350
6	Kabupaten Toli -Toli	87
7	Kabupaten Buol	-
8	Kabupaten Parigi Moutong	256
9	Kabupaten Tojo Una - Una	145
10	Kabupaten Sigi	766
11	Kabupaten Banggai Laut	-
12	Kabupaten Morowali Utara	29
13	Kota Palu	45
Total Keseluruhan		2.720

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulteng

Satuan perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Tahun 2024 dari 11 (sebelas) kabupaten dan 1 (satu) kota sejumlah 2.720 Unit. Satuan perumahan yang sudah dilengkapi dengan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) adalah kawasan permukiman yang lengkap dan layak huni. PSU mencakup infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan air minum, serta fasilitas penunjang seperti taman, tempat ibadah, dan area hijau yang menjadi satu kesatuan sistem untuk mendukung kehidupan yang sehat, aman, dan nyaman. Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah melengkapi PSU mencakup infrastruktur yaitu Jalan Lingkungan dan Drainase pada

perumahan dan kawasan permukiman yang telah ditentukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

PRESENTASI LUAS LAHAN BERSERTIFIKAT TAHUN 2024

Tabel 15. Presentasi Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2024

No	Nama Kantah	Luas Wilayah (m ²)	Luas Total Sertifikat (m ²)	Sudah Sertifikat (%)	Luas Total Belum Sertipikat (m ²)	Belum Sertifikat (%)
1	Kabupaten Banggai Kepulauan	1.897.591.206	253.312.434	13	1.644.278.772	87
2	Kabupaten Banggai	10.210.045.275	2.141.830.029	21	8.068.215.246	79
3	Kabupaten Morowali	3.986.549.066	640.016.028	16	3.346.533.038	84
4	Kabupaten Poso	5.302.086.389	711.578.175	13	4.590.508.214	87
5	Kabupaten Donggala	2.227.063.878	460.259.443	21	1.766.804.435	79
6	KabupatenToli -Toli	2.698.383.724	423.743.565	16	2.274.640.159	84
7	Kabupaten Buol	2.234.649.469	830.640.409	37	1.404.009.060	63
8	Kabupaten Parigi Moutong	5.574.293.781	447.060.551	8	5.127.233.230	92
9	Kabupaten Tojo Una - Una	4.143.003.416	452.448.382	11	3.690.555.034	89
10	Kabupaten Sigi	4.356.527.431	321.450.523	7	4.035.076.908	93
11	Kabupaten Banggai Laut	519.956.785	136.720.385	26	383.236.400	74
12	Kabupaten Morowali Utara	5.976.755.455	930.878.485	16	5.045.876.970	84
13	Kota Palu	220.192.929	112.556.396	51	107.636.533	49
Total		6.716.905.169	1.180.155.266	18	5.536.749.903	84

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulteng

Luas lahan bersertifikat tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan data yang diidentifikasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Sulawesi Tengah, kementerian di Indonesia yang bertanggung jawab atas urusan pertanahan dan tata ruang. ATR/BPN bertugas mengatur kepemilikan tanah, melakukan pendaftaran hak atas tanah, dan mengelola penataan ruang demi kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat.

Presentasi Luas Lahan Bersertifikat tahun 2024 merupakan data prioritas yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 500.14.3.4/533/BAPPEDA-G.ST/2024 tentang Data Daerah dan Data Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah.

Terlihat pada tabel luas lahan bersertifikat tahun 2024 sejumlah 1.180.155.266m² atau sebanyak 18% yang telah bersertifikat dan luas lahan yang belum bersertifikat sejumlah 5.536.749.903m² atau sebanyak 84% data ini teridentifikasi dari luas wilayah 6.716.905.169 m².

JUMLAH KEPALA KELUARGA PENERIMA AKSES REFORMA AGRARIA

Tabel 16. Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria

NO	Kabupaten	Target Subjek (KK)	kecamatan	Desa	Jumlah Penerima Akses Reforma Agraria (KK)
1	Banggai	500	Banggai Selatan	kelapa lima	100
				bentean	100
				tolokibit	100
			Banggai	pasir putih	100
				lambako	100
2	morowali utara	500	sojo jaya	malino jaya	100
				sumara jaya	100
				lembah sumara	100
				tamainusi	100
				panca makmur	100
3	Donggala	500	Sindue	dalaka	160
				lero tatari	100
			tanantovea	wombo mpanau	100
				nupa bomba	140
4	Toli Toli	500	Dako Pamean	dungingis	300
				galumpang	200
5	Poso	500	Poso pesisir	Tokorondo	100
			lage	sintuwulemba	40
				sepe	177
				silanca	143
				tagolu	40
6	Banggai Laut	500	mantoh	sobol baru	50
				binotik	100
				pondan	150
				sulubombong	100
			luwuk utara	buon mandiri	100

7	Palu	500	palu selatan	kawatuna	111
			Palu Utara	kayumalue ngapa	100
				taipa	100
			tatanga	pengawu	100
			mantikulore	poboya	89
8	morowali	500	Bungku tengah	Pu'Ungkoilu	200
			bungku timur	Lahuafa	100
				Unsongi	200
9	Buol	500	Gadung	bulagidun tanjung	100
				bulagidun	200
				Lripubago	200
10	Parimo	500	Parigi Selatan	Nambaru	500
11	Banggai Kepulauan	500	Tinangkung	Ambelang	70
			Liang	Okumel	100
			Peling Tengah	Patutuki	130
				Alakasing	130
				Sambulangan	70
12	Tojo Una Una	500	Ulubongka	Takibangke	80
			Amapana Tete	Uemakuni	100
				Borone	100
				Urundaka	100
			Ampana Kota	Buntongi	120
13	Sigi	500	Dolo	Maku	100
			Tanambulava	Sibowi	100
				Sibalaya Utara	100
				Lambara	100
				Sibalaya Selatan	100
TOTAL		6500			

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulteng

Terdapat Jumlah kepala keluarga penerima akses reforma agraria pada Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah 6.500 KK. Data ini terdapat pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Sulawesi Tengah,

kementerian di Indonesia yang bertanggung jawab atas urusan pertanahan dan tata ruang. ATR/BPN bertugas mengatur kepemilikan tanah, melakukan pendaftaran hak atas tanah, dan mengelola penataan ruang demi kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat.

Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria tahun 2024 merupakan data prioritas yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 500.14.3.4/533/BAPPEDA-G.ST/2024 tentang Data Daerah dan Data Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah.

JUMLAH BIDANG TANAH YANG DIREDISTRIBUSI (BIDANG TANAH) TAHUN 2024

Tabel 17. Jumlah Bidang Tanah yang didistribusi (Bidang Tanah)
Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Bidang
1	Kabupaten Banggai Kepulauan	500
2	Kabupaten Banggai	1.500
3	Kabupaten Poso	2.450
4	Kabupaten Donggala	1.000
5	Kabupaten Toli -Toli	2.000
6	Kabupaten Buol	50
7	Kabupaten Parigi Moutong	2.500
8	Kabupaten Tojo Una - Una	1.000
9	Kabupaten Sigi	1.000
10	Kabupaten Banggai Laut	300
11	Kabupaten Morowali Utara	700
TOTAL		13.000

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulteng

Jumlah Bidang Tanah yang didistribusi (Bidang Tanah) yang terlihat pada tabel 10. Merupakan data yang teridentifikasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Sulawesi Tengah, kementerian di Indonesia yang bertanggung jawab atas urusan pertanahan dan tata ruang. ATR/BPN bertugas mengatur kepemilikan tanah, melakukan pendaftaran hak atas tanah, dan mengelola penataan ruang demi kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat. Jumlah Bidang Tanah yang didistribusi (Bidang Tanah) yang teridentifikasi sejumlah 13.000 bidang.

Jumlah Bidang Tanah yang didistribusi (Bidang Tanah) tahun 2024 merupakan data prioritas yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 500.14.3.4/533/BAPPEDA-G.ST/2024 tentang Data Daerah dan Data Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Nomor 000.7/341/Bappeda-G.ST/2025 tanggal 15 Oktober 2025 tentang Daftar Data Daerah dan Data Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 001.1/20/DIS.PERKIM Tentang Penetapan Walidata Dan Operator Aplikasi Siperkim Banuata Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2025.
- Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 500.14.3.4/ 533/BAPPEDA-G.ST/2024 tentang Data Daerah dan Data Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 001.1/20/DIS.PERKIM Tentang Penetapan Walidata Dan Operator Aplikasi Siperkim Banuata Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2024
- Surat Keputusan Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Nomor. 188.45/0585/DPU tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Donggala tanggal 1 April 2016.
- Surat Keputusan Bupati Poso Provinsi Sulawesi Tengah Nomor. 188.45/307-Bapelitbangda/2020 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Poso tanggal 18 September 2020.
- Surat Keputusan Bupati ToliToli Provinsi Sulawesi Tengah Nomor. 687 Tahun 2020 tentang Penetapan Pengurangan Lokasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten ToliToli tanggal 29 September 2020.
- Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Nomor. 609.15/1571/DPKP tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Parigi Moutong tanggal 18 Januari 2020.
- Surat Keputusan Bupati Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Nomor. 800/56/DISPERKIMTAN tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Banggai tanggal 10 Juni 2021.

- Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah Nomor. 188.45/226/DPKPLH/2021 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tojo Una-Una tanggal 07 September 2021.
- Surat Keputusan Wali Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor. 653/1215/DPKP PERUMAHAN/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Palu Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021.
- Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor. 338 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Banggai Kepulaun tanggal 20 September 2022.
- Surat Keputusan Bupati Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Nomor. 188.4.45/KEP.0199/DPKPP/2022 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Morowali tanggal 17 Juni 2022.
- Surat Keputusan Bupati Buol Provinsi Sulawesi Tengah Nomor. 188.04/645.50/DISPERKIM/2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Buol tanggal 22 Desember 2023.
- Surat Keputusan Bupati Sigi Provinsi Sulawesi Tengah Nomor. 596-210 tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sigi tanggal 17 Mei 2023.
- Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah Nomor. 653/639/PU-PR/2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Banggai laut tanggal 14 Desember 2023.
- Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Nomor. 188.45/KEP-B.MU/0213/X/2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Morowali tanggal 06 Oktober 2023.